

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELEWENGAN DANA DESA**
(Studi pada Polres Lampung Barat).

¹M. Ruhly Kesuma Dinata, ²Irhamudin

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *In accordance with Article 72 of Law 6 of 2014 concerning Rural Areas, village income sourced from the APBN or village funds comes from central spending by increasing the efficiency and equity of village programs. The amount of the budget allocation that is allocated directly to the village is set at 10%. the amount paid to the area (above). In addition, Law Number 6 of 2014 also strengthens the allocation of village funds (ADD) from district/city balancing funds.*

Given the enormous power of the village head in administering village government based on the Decree of the Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 Article 14, it is necessary to review and balance the administration of village governance. The agency authorized to supervise village heads on village household expenditures is the BPD. The role of the village council as the controlling body of the village government requires responsibility and ability in carrying out its duties. It is also clear that according to the Decree of the Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005, the BPD is an institution that embodies democracy under the leadership of the village government as part of the village administration with the village head.

Abstrak: Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Perdesaan, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau dana desa berasal dari belanja pusat dengan meningkatkan efisiensi dan pemerataan program desa. Besaran alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditetapkan sebesar 10%. jumlah yang dibayarkan ke daerah (di atas). Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga memperkuat alokasi dana desa (ADD) dari dana perimbangan kabupaten/kota. Mengingat begitu besarnya kekuasaan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14, maka perlu ditinjau dan diseimbangkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Instansi yang berwenang mengawasi kepala desa atas pengeluaran rumah tangga desa adalah BPD. Peran dewan desa sebagai badan pengendali pemerintahan desa memerlukan tanggung jawab dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dijelaskan pula bahwa menurut Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, BPD adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi di bawah pimpinan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan desa dengan kepala desa.

Katakunci, Dana, desa, Tindakpidana

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Perdesaan, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau dana desa berasal dari belanja pusat dengan meningkatkan efisiensi dan pemerataan program desa. Besaran alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditetapkan sebesar 10%. jumlah yang dibayarkan ke daerah (atas). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memperkuat alokasi dana desa (ADD) dari dana perimbangan kabupaten/kota.

Mengingat begitu besarnya kekuasaan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14, maka perlu dilakukan peninjauan dan perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan yang berwenang mengawasi kepala desa terhadap pengeluaran rumah tangga desa adalah BPD. Peran dewan desa sebagai badan pengendali pemerintahan desa memerlukan tanggung jawab dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Jelas juga bahwa menurut Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, BPD adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi di bawah kepemimpinan pemerintah desa sebagai

bagian dari pemerintahan desa dengan kepala desa.

Tujuan dana desa adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di setiap desa, dengan pemerataan pembangunan di berbagai sektor bahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun kenyataan yang ada saat ini adalah masyarakat desa di berbagai provinsi di Indonesia menyalahgunakan anggaran desa.

Polda Lampung Barat berhasil dalam kasus Eclipse dari Pekon pengambilan dan pengeluaran Anggaran (APBP) dalam penemuan, bertindak peratin Sukamulya, Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Candra Gunawan (41) sebagai kondisi Civillatus (ASN) yang lampung Kabupaten Transportasi, Komunikasi dan Informatika Barat Laporan cacat APBP Uang dari RP. 199.260,000 Nilai anggaran tahun 2016 mulai RP. 840 juta. Mencurigai penipuan dengan setidaknya satu pasar biaya, baik bahan, peralatan kerja dan upah untuk beberapa kegiatan pengembangan berbagai infrastruktur Pekon Sukamulya di 2016. di Markup, tersangka meminta catatan kosong di gudang materi situs ke surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan memasukkan orang lain daripada harga yang harus dibayar. Saku tindakan, tersangka dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 Hukum Jo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dengan pasal pidana

mengancam 2 (1) dan 3 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang memerangi kejahatan korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelewengan Dana Desa** (Studi pada Polres Lampung Barat).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan problematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan dan buku tentang masalah yang dibahas oleh penulis. (Suteki dkk, 2018: 104).

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Proses Penyimpangan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Pekon Sukamulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat

Dalam konteks penuntutan pidana, dan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, Polri merupakan kepala penyidik yang menangani segala tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan penyidikan pendahuluan lanjutan sebagaimana umumnya dipersyaratkan oleh PERCAP. Bagian 16 Undang-Undang Februari 2002 Wewenang Kepolisian Negara adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Mencegah orang memasuki tempat kerja untuk penyelidikan membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c) Memerintahkan para tersangka untuk ditangkap, diinterogasi dan diidentifikasi;
- d) Temukan dan simpan karakternya.
- e) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan diinterogasi sebagai tersangka atau saksi.
- f) Panggil ahli yang diperlukan untuk menyelidiki masalah.)
- g) Hentikan penyelidikan. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

h) Membantu penyidik sipil dalam pembinaan dan penyidikan, serta menerima hasil penyidikan dari penyidik sipil dan menyampaikannya kepada penduduk.

Proses dalam hal terjadinya peristiwa pidana ini dilakukan dengan tindakan oleh pihak kepolisian apabila ada laporan masuk ke kepolisian atau mengetahui sendiri peristiwa pidana tersebut. Maka proses tindakan dalam hal ini yang dimaksud dalam hukum acara pidana dapat dimulai, sumber tindakan adalah apa yang melatar belakangi dimulainya proses tindakan dalam hukum acara pidana. Pasal 102 ayat (1) KUHP menyebutkan: penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang kejadiannya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Adapun proses penyelidikan. Proses penyelidikan sejatinya merupakan proses pertama dalam hukum acara pidana, setelah terdapat salah satu sumber tindakan sebagaimana diuraikan diatas. Pengertian tentang penyelidikan dinyatakan tegas pada Pasal 1 Pasal 5 KUHP dan ketentuan lain yang relevan. Investigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengidentifikasi peristiwa yang mencurigakan untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan.

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan penggunaan dan penyaluran alokasi anggaran Dana Sosial yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, sehingga khususnya berdampak tersendiri bagi warga. ekonomi pedesaan lebih produktif, kemiskinan dan ketimpangan antardesa berkurang. Besar kecilnya anggaran alokasi dana desa yang dialokasikan ke desa tergantung pada letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan desa. Penyaluran dana di bidang pertanian Pemerintah pusat berharap pemerintah desa dapat menggunakan anggaran sesuai kebutuhan, tanpa harus mengalokasikan dana. Dengan demikian, pendapatan berikutnya yang diterima oleh Desa Sukamula, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 termasuk pendapatan utama desa sebesar Rp 110.525.000,00, Pekon Fundusz Rp. 868.772.000,00 dan peruntukan Dana Peconium sebesar Rp. 302.645.000, sehingga total dana desa yang diterima desa Sukamula, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah Rp. 1.281.942.000,00 dan menyangkut kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBP) Desa Sukamul, total anggaran yang diterima dari Dana Desa berasal dari Dana Distribusi Pendapatan

dan Dana Distribusi Umum sebesar Rp. 302.645.000, dimana 42,40% dari seluruh keuangan desa. Anggaran Yayasan Peconium sebesar Rs dialokasikan untuk pembangunan desa. 365 juta, yang hanya pembangunan fisiknya adalah Rs. 305 juta rupiah dan untuk pembangunan non fisik. 60.000.000.

1. BPD tidak optimal berfungsi sebagai partner kepala pekon dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembangunan.

Dewan Kota adalah komite penasihat tingkat kota yang membahas dan membuat keputusan tentang berbagai masalah kebijakan kota. Dewan Penasihat Kota adalah badan penasihat tingkat kota yang membahas dan menyepakati berbagai kebijakan administrasi kota untuk meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dewan desa memenuhi tanggung jawab pemerintah dan, sebagai anggota, secara demokratis mewakili penduduk pedesaan melalui perwakilan lokal. Tugas anggota dewan kota dapat dilakukan oleh majelis perwakilan. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan mensosialisasikan hasil kelembagaan desa di tingkat kota, memperkuat serikat pekerja untuk mengelola keuangan desa, membina tata kota yang baik, dan mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,

Pemerintah kota atau dewan kota mempromosikan pelaksanaan dewan kota.

Hukum kota berlaku untuk sistem lokal. Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan (LKD) meliputi Rukun Tetangga (RT), Kesatuan Masyarakat (RW), Pemberdayaan Keluarga Peduli (PKK), Karang Taruna, Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Bisa saja.) disertakan. Fasilitas masyarakat pedesaan merupakan mitra untuk memperkuat masyarakat pedesaan, dan berfungsi sebagai wadah partisipasi dan komunikasi pedesaan sehingga masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendidikan LKD dilakukan dengan daftar desa dengan karakteristik yang rinci:

1. Memberdayakan masyarakat pedesaan
2. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pedesaan.

LKD memiliki beberapa fitur berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan cita-cita masyarakat.
2. Mempromosikan dan memperkuat kohesi dan integritas sosial.
3. Meningkatkan dan mempercepat kualitas pelayanan administrasi pedesaan kepada masyarakat pedesaan.

4. Merencanakan, melaksanakan, memantau dan berpartisipasi dalam pembangunan dan hasil pembangunan.
5. Cara penumbuhan, pengembangan dan mobilisasi prakarsa, kemitraan, gotong royong dan kerjasama sosial
6. ditingkatkan kesejahteraan pada keluarga
7. Meningkatkan kualitas karyawan

Adapun hak pemerintah desa antara lain:

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Wewenang Kepala Desa antara lain:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD)
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Kewajiban pemerintahan desa

Adapun kewajiban pemerintah desa yaitu:

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat di desa yang bersangkutan;

2. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
3. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan Korban menemui terlapor dalam rangka meminta steatmen / konfirmasi terkait permasalahan pertandingan sepakbola yang diadakan pada event BUPATI CUP, dikarenakan terlapor selaku ketua panitia kegiatan tersebut, namun terlapor tiba-tiba marah-marah dan merampas Handycarm milik korban, sehingga korban berusaha mengelak dan terlapor langsung memukul korban di bagian pelipis mata sebelah kanan, luka lecet/lebam pada bagian pelipis mata sebelah kanan korban.

Hasil Wawancara terhadap Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Memberikan Penafsiran dalam penyidikan pendahuluan secara substansial diatur dalam Undang-Undang Pasal 106 KUHAP, namun tata cara penetapan ganti rugi suatu tindak pidana tidak jauh berbeda dengan tata cara penetapan acara pidana

lainnya. Adapun fungsi penyidik menurut Pasal 5 KUHAP dan fungsi yang dapat dilakukan atas perintah penyidik adalah sebagai berikut.

- a. penahanan, larangan bepergian, penggeledahan dan penyitaan
- b. Review dan registrasi dokumen
- c. Ambil sidik jari dan foto seseorang. Bawa ke pencari dan saksi.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Proses penanganan tindakan penganiayaan yang terjadi pada wartawan di Sat Reskrim Polres Lampung Barat Hal ini terbatas pada penyelidikan publik dan penyelidikan melalui perolehan informasi ahli. Ketika bukti yang cukup diamankan, anggota Sat Recreum Polres Lampung Barat tidak punya pilihan selain mengambil tindakan seperti menangkap pelaku dan menyelidiki tersangka. Seorang saksi telah dibuat. Dan menurut keterangan saksi, kecurigaan tersebut cukup kuat sehingga anggota SAT Rescream Polres Lampung Barat dapat menaikkan status tersangka menjadi tersangka dan mengukuhkan proses eksekusi kasus tersebut. anggota SAT Racecrime Polres Lampung Barat mengumpulkan bukti. Setelah itu, dia dipindahkan ke Kejaksaan, di mana kejaksaan sedang mengusut kasus di Polres Lampung Barat. Jika jaksa

memutuskan masih belum lengkap, penyidikan akan dikirim ke Polsek Buk Lampung untuk melanjutkan persidangan.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Sat Reskrim Polres Lampung Barat Ini hanya berlaku untuk proses perizinan. Setelah saksi-saksi siap dan berkas-berkasnya lengkap, anggota SAT Racecrime Polares Lampung Barat akan membawa tersangka dan dokumen setelah SAT Racecrime selesai. Proses penuntutan terhadap pelapor kriminal polsek Lampung Barat di negara modern ditandai dengan ciri birokrasi di mana polisi berfungsi sebagai penjahat, jaksa sebagai jaksa, dan hakim sebagai hakim. Ketiga subsistem tersebut mendukung sistem penegakan hukum 1(satu) yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menurut sistem hukum Indonesia yang erat kaitannya dengan benua, subsistem hukum administrasi mengutamakan berbagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab, sehingga makna keadilan tidak lagi dianggap di atas makna kepastian hukum.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Wartawan, dalam hal ini kejaksaan, harus lebih memperhatikan wartawan investigasi dan sejenisnya agar angka penyalahgunaan tidak semakin

meningkat. Kita juga perlu melibatkan masyarakat sehingga polisi dan masyarakat dapat tetap berhubungan dan menangani banyak kasus pelecehan ketika pihak berwenang mengetahuinya.

Penegakan hukum harus selalu memperhatikan hak asasi manusia. Hak adalah karena orang ingin melindungi haknya. Bukan hanya untuk kemaslahatan rakyat, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang hukum. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar, melekat, universal dan perlu. Ini termasuk hak-hak yang dimiliki oleh para korban penganiayaan.

Kejahatan penyiksaan tersebar luas di masyarakat dan mendapat perhatian besar dari pembuat undang-undang. Bahkan, hampir setiap hari media massa dan media elektronik dibanjiri dengan peristiwa seperti itu. Ke depan, pendekatan sistematis untuk penuntutan memiliki kelemahan serius:

- a. Tindak pidana menurut Pasal 351 KUHP adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian berat.
- b. Tindakan pidana yang mengakibatkan kerusakan serius yang disengaja dan menyebabkan kerusakan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP Italia.
- c. KUHP Tindak pidana menurut Pasal 354 KUHP menimbulkan kerugian yang serius.

Pelecehan serius dan disengaja berarti pelecehan serius dan disengaja dalam arti pasal 355 KUHP. Korban menemui terlapor dalam rangka meminta steatmen / konfirmasi terkait permasalahan pertandingan sepakbola yang diadakan pada event BUPATI CUP, dikarenakan terlapor selaku ketua panitia kegiatan tersebut, namun terlapor tiba-tiba marah-marah dan merampas Handycarm milik korban, sehingga korban berusaha mengelak dan terlapor langsung memukul korban di bagian pelipis mata sebelah kanan, luka lecet/lebam pada bagian pelipis mata sebelah kanan korban.

Hasil Wawancara terhadap Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Memberikan Penafsiran dalam penyidikan pendahuluan secara substansial diatur dalam Undang-Undang Pasal 106 KUHAP, namun tata cara penetapan ganti rugi suatu tindak pidana tidak jauh berbeda dengan tata cara penetapan acara pidana lainnya. Adapun fungsi penyidik menurut Pasal 5 KUHAP dan fungsi yang dapat dilakukan atas perintah penyidik adalah sebagai berikut.

- a. penahanan, larangan bepergian, penggeledahan dan penyitaan

- b. Review dan registrasi dokumen
 - c. Ambil sidik jari dan foto seseorang.
- Bawa ke pencari dan saksikan.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Proses penanganan tindakan penganiayaan yang terajadi pada wartawan di Sat Reskrim Polres Lampung Barat Hal ini terbatas pada penyelidikan publik dan penyelidikan melalui perolehan informasi ahli. Ketika bukti yang cukup diamankan, anggota Sat Recreum Polres Lampung Barat tidak punya pilihan selain mengambil tindakan seperti menangkap pelaku dan menyelidiki tersangka. Seorang saksi telah dibuat. Dan menurut keterangan saksi, kecurigaan tersebut cukup kuat sehingga anggota SAT Rescream Polres Lampung Barat dapat menaikkan status tersangka menjadi tersangka dan mengukuhkan proses eksekusi kasus tersebut. anggota SAT Racecrime Polres Lampung Barat mengumpulkan bukti. Setelah itu, dia dipindahkan ke Kejaksaan, di mana kejaksaan sedang mengusut kasus di Polres Lampung Barat. Jika jaksa memutuskan masih belum lengkap, penyidikan akan dikirim ke Polsek Buk Lampong untuk melanjutkan persidangan.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021

Jam 09.30 Wib, Sat Reskrim Polres Lampung Barat Ini hanya berlaku untuk proses perizinan. Setelah saksi-saksi siap dan berkas-berkasnya lengkap, anggota SAT Racecrime Polares Lampung Barat akan membawa tersangka dan dokumen setelah SAT Racecrime selesai. Proses penuntutan terhadap pelapor kriminal polsek Lampung Barat di negara modern ditandai dengan ciri birokrasi di mana polisi berfungsi sebagai penjahat, jaksa sebagai jaksa, dan hakim sebagai hakim. Ketiga subsistem tersebut mendukung sistem penegakan hukum 1(satu) yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menurut sistem hukum Indonesia yang erat kaitannya dengan benua, subsistem hukum administrasi mengutamakan berbagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab, sehingga makna keadilan tidak lagi dianggap di atas makna kepastian hukum.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Wartawan, dalam hal ini kejaksaan, harus lebih memperhatikan wartawan investigasi dan sejenisnya agar angka penyalahgunaan tidak semakin meningkat. Kita juga perlu melibatkan masyarakat sehingga polisi dan masyarakat dapat tetap berhubungan dan menangani banyak kasus pelecehan ketika pihak berwenang mengetahuinya.

Penegakan hukum harus selalu memperhatikan hak asasi manusia. Hak adalah karena orang ingin melindungi haknya. Bukan hanya untuk kemaslahatan rakyat, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang hukum. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar, melekat, universal dan perlu. Ini termasuk hak-hak yang dimiliki oleh para korban penganiayaan.

Kejahatan penyiksaan tersebar luas di masyarakat dan mendapat perhatian besar dari pembuat undang-undang. Bahkan, hampir setiap hari media massa dan media elektronik dibanjiri dengan peristiwa seperti itu. Ke depan, pendekatan sistematis untuk penuntutan memiliki kelemahan serius:

- d. Tindak pidana menurut Pasal 351 KUHP adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian berat.
- e. Tindakan pidana yang mengakibatkan kerusakan serius yang disengaja dan menyebabkan kerusakan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP Italia.
- f. KUHP Tindak pidana menurut Pasal 354 KUHP menimbulkan kerugian yang serius.

Pelecehan serius dan disengaja berarti pelecehan serius dan disengaja dalam arti pasal 355 KUHP.

Alokasi Dana Desa Terserah dana perwalian/masyarakat untuk mengalokasikan anggaran ke kota ini dan menerima pendapatan dan dana distribusi publik yang merupakan bagian dari dana perimbangan fiskal pusat dan negara bagian. Anggaran untuk setiap segmen kabupaten/kota sebesar 10% dari dana bagi hasil tahunan, dan Dana Utang Negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) diatur oleh Gubernur/Walikota sebagaimana diatur dalam proses pemberiannya. Anggaran Desa Anda bisa membantu pemerintah desa dengan anggaran dari APBD desa.

Tahap implementasi ini merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan dimana program sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan tercapai. Pada tahap implementasi ini, proses perencanaan keuangan kota, termasuk pendapatan dan pengeluaran, sedang berlangsung. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi anggaran desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan tidak berwujud dengan menetapkan anggaran desa untuk desa Sokamria, Kabupaten Sokao, Lampon Barat, sesuai dengan Peraturan No. Gubernur Lampung Barat 2009 10. do. Pemerintah daerah digunakan untuk mengelola alokasi daerah. BOPD dan OPEX adalah 30 dan 70 digunakan untuk kegiatan community building. Metodologi penyaluran anggaran

desa akan dijelaskan mengenai efektivitas pengelolaan penyaluran anggaran desa dalam kegiatan pembangunan desa.

Buka akun Pecon Cash Anda. Untuk menarik uang dari keuangan kota, Anda perlu mengetahui tanda tangan walikota dan manajer keuangan Bacon. Staf desa harus menyerahkan alokasi anggaran desa kepada walikota mereka di akhir kegiatan. Hal ini terutama terjadi ketika mengalokasikan anggaran desa untuk semua dana pada tahap perencanaan ke anggaran yang direncanakan pada tahap perencanaan. Untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan kota, pengelola keuangan kota dapat menyediakan keuangan kota dalam jumlah yang tetap ke keuangan kota. Jumlah maksimum yang dapat Anda hemat dengan keuangan kota Anda adalah hingga 5% dari biaya Anda saat ini. Pembayaran kepada pihak ketiga juga dilakukan secara tunai untuk keperluan bisnis (gaji) reguler. Kemajuan dikomunikasikan kepada orang yang melakukan kegiatan dengan persetujuan walikota setelah konfirmasi kepala desa. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan desa ditandatangani oleh walikota dan kepala keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Setelah dikurangi Dana Tujuan Khusus (DAK), perimbangan anggaran yang diterima dari negara/kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBD). Tambahkan 10 atau lebih dana ke APBD kabupaten/kota dikurangi target anggaran khusus untuk APBD kabupaten. Manajemen tambahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan umpan balik. Semua langkah tersebut dilakukan oleh pengelola desa dan bersama dengan tim pendukung bottom-up, langkah-langkah tersebut didasarkan pada Permangarin Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebuah rencana proses definisi adalah tujuan yang harus dicapai di masa depan dan mengidentifikasi tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan keuangan kota membutuhkan rencana strategis langkah demi langkah. Pembangunan pedesaan dicapai melalui partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan bersama dewan perencana.

Berdasarkan alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Lampung Barat, Setelah pekerjaan selesai dan pekerjaan selesai, Surat Permohonan Pembayaran (PSP) dan Biaya Perencanaan Anggaran (RAB) dilengkapi dan diserahkan kepada sekretaris kota. Setelah disetujui, ke walikota.

Kelembagaan pedesaan yang optimal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kekuasaan yang terbatas dari penduduk desa dan kepala desa, dan biaya politik yang tinggi dari pemilihan desa.

Pada tahun 2019, anggaran administrasi desa akan ditingkatkan, dan anggaran desa yang akan digunakan ADD dan anggaran untuk kedua desa akan diumumkan, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa.

2. Modus Memperlambat Pencairan Dana
Para peneliti bekerja untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam dua bidang hukum: hukum normatif dan hukum sosial progresif. Teknologi standar berarti bahwa penjahat hanya mematuhi beberapa ketentuan hukum. Seperangkat prinsip hukum atau peraturan yang menjadi tujuan atau dasar untuk melakukan proses hukum di tingkat penelitian. Ranah hukum hanyalah salah satu objek hukum yang sebenarnya atau rumusan sederhana, yaitu rumusan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap jurnalis, dalam hal ini polisi, harus lebih fokus dan proaktif dalam mengusut kasus-kasus kriminal, termasuk penganiayaan serius terhadap korban. Kecuali jika angka penyalahgunaan terus meningkat. Dalam menangani banyak kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis, polisi harus melibatkan masyarakat dan polisi harus memberi tahu pihak berwenang. Karena masyarakat ingin melindungi hak-haknya,

maka aparat penegak hukum harus selalu peduli dengan hak asasi manusia. Padahal, bukan hanya untuk kepentingan publik, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang hukum.

Dalam penyidikan, faktor-faktor tersebut harus dimasukkan dalam perbuatan tersangka menurut Pasal 351 (1). Alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan terdakwa, telah menentukan persyaratan pembuktian minimal dan terdapat bukti bahwa terdakwa melanggar teks pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal 351(2) KUHP.

Mengacu pada rencana pembangunan di tingkat pengelola/kota sesuai dengan yang berwenang menetapkan rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu bisnis. Menurut pemerintah kota, rencana pembangunan pedesaan berjalan di bawah Rencana Keuangan Seimbang Bacon. Penting untuk menyeimbangkan dua program. jam. Efektif menggunakan anggaran yang dialokasikan pada anggaran desa untuk pengembangan rencana pembangunan desa.

Model keterlambatan pembayaran upah desa ini dianggap sebagai praktik umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari walikota atau

untuk mengembangkan kebijakan tentang penggunaan uang desa. Dehyar Rausta berada pada posisi yang sangat strategis untuk memenangkan pemilu.

Korupsi dari berbagai bentuk dana desa ini diharapkan jika semua tahapan pencairan dana desa diawasi oleh warga desa dan berbagai organisasi dengan manajemen yang efektif. Penyalahgunaan kekuasaan selalu dimungkinkan karena ada peluang yang terbuka.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu kepasal 63 KUHP Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar, misalnya dalam kasus hukum media kan ancamannya cuma 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63 kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta

visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritas Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi Rifai yaitu Ahli Pidana dan dr Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran.

Dalam memenuhi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kami berdasarkan hukum utama kota, kami:

1. Pada akhir semester, menyampaikan laporan perkembangan pemerintahan kota kepada bupati atau walikota.
2. Menyampaikan pernyataan tertulis pemerintah kepada Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Memberikan dan/atau mempublikasikan informasi tertulis tentang kegiatan masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada tingkat tanggung jawab ini, Dehyar Rausta bertanggung jawab untuk mengelola keuangan kota sesuai dengan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya untuk menjadi seorang Dehyar. Laporan

Pertanggungjawaban terdiri dari laporan dari walikota kepada pengawas tentang kegiatan administrasi kota dan termasuk dalam laporan setengah tahunan dan setengah tahunan.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu ke pasal 63 KUHP Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar, misalnya dalam kasus hukum media ancaman nya cuma 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63 kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu

termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritas Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi Rifai yaitu Ahli Pidana danr Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran. Tujuannya adalah untuk menetapkan anggaran (RAB) dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh ADP. Tim pelaksana bertanggung jawab atas Pekon.

Modus korupsi Dana Pekon Suka Mulya. Modus korupsi dana Pekon Suka Mulya Bahkan, ada pola serupa, seperti membeli barang dan jasa yang tidak adil atau menipu, menaikkan anggaran, tidak ikut debat daging di masyarakat, dan menyalahgunakan uang desa untuk kepentingan pribadi. Kota yang subur dari korupsi. Modus korupsi dana Pekon Suka Mulya, modus itu antara lain:

1. Memberikan perkiraan biaya di atas nilai pasar jika pembelian terbuka dan menggunakan kapasitas desa setempat. Misalnya, Anda dapat membeli bahan bangunan dari bengkel konstruksi desa dan berkolaborasi dalam biaya dan harga barang yang Anda butuhkan.
2. Bahkan jika proyek tersebut berasal dari sumber pendanaan lain, Anda

- bertanggung jawab untuk membiayai bangunan yang sebenarnya dengan dana desa.
3. Situasi ini hanya dapat dilihat oleh pengawas yang memahami alokasi keuangan kota. Hal ini karena biasanya relatif tersembunyi. Oleh karena itu, APBD harus terbuka bagi seluruh warga negara untuk memantau.
 4. Penagihan atau pengurangan pajak kota oleh otoritas lingkungan atau lingkungan. Ini terjadi karena berbagai alasan aparat desa tak segan-segan melaporkan kasus yang paling menyakitkan di desa.
 5. Bisnis palsu oleh walikota dan stafnya. Ada banyak artikel perjalanan seperti pendidikan. Lebih untuk bersenang-senang. Didistribusikan oleh otoritas lokal untuk biaya. Setelah situasi ini berakhir, aparat desa dengan kenaikan upah harus melaporkan kejadian tersebut.
 6. Jika tidak, bahkan jika Anda curiga Anda membelanjakan uang secara ilegal. Membayar banyak uang untuk perlengkapan kantor. Anda dapat melihatnya secara fisik, tetapi Anda perlu mencari tahu apa pengaturannya. Mengumpulkan pajak kota atau bea.
 7. Namun, hasil yang dikumpulkan tidak disimpan di kas kota atau kantor pajak. Regulator perlu melihat sumber penerimaan untuk sektor pajak ini.
 8. Beli obligasi kantor dengan uang kota, tetapi gunakan untuk penggunaan pribadi.
- Situasinya adalah sebagai berikut.
- (a) Surat jawaban palsu dari walikota (SPJ). Untuk ini, walikota menerima anggaran 1 chloreliyad. 100.000.000 - (100 juta rupiah). Penduduk desa membuat Pecan APB dan membeli Peco. Selain itu, perwakilan Peco menyerahkan Buku Virtual Account (SPJ) tanpa mengajukan proposal.
 - (b) Spesifikasi busa kepala Peco (spesifikasi). Untuk ini, walikota menerima 5 juta won. Bekerja sama dengan rekan-rekan 100 juta (100 juta rupiah) di aspal 3 cm (3 cm), aspal 2 cm (2 cm). Ada paver aspal dengan lebar dan panjang yang sama, tetapi ketebalan aspalnya berbeda dari rencana semula.
 - (c) Dana Bacon Fund telah didistribusikan. Namun, uang ini tidak digunakan secara langsung untuk kepentingan kota, tetapi untuk penggunaan pribadi.
 - (d) Presiden PECO tidak melakukan kegiatan apapun yang diramalkan dalam APB-PECON. Namun, kegiatan tersebut fiktif dan anggarannya digunakan untuk kepentingan pribadi walikota.
- Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres

Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu ke pasal 63 KUHP. Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar, misalnya dalam kasus hukum media ancaman nya cuma 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63 kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritias Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi

Rifai yaitu Ahli Pidana dan Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran.

Crimpm korupsi Indonesia tumbuh di masyarakat, tetapi pengembangan berbeda dari menerapkan jumlah kasus dan jumlah kerugian nasional dan kualitas kerugian negara. Ini lebih sistematis, dan memasuki semua aspek kehidupan masyarakat adalah berbagai. Masalah korupsi adalah masalah moral, sikap spiritual, masalah lingkungan, masalah lingkungan dan kesenjangan sosial ekonomi dan efek / masalah sistem, sistem / masalah politik dan birokrasi yang sulit, dan berbagai kompleksitas. Prosedur administrasi dalam layanan keuangan dan publik.

Korupsi pribadi harus selalu digunakan sebagai bagian dari program sebagai bagian dari program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi internasional. Pasal 25, 1999, Pasal 25, Pasal 25, 2001 Pasal 25, Korupsi, Korupsi, Korupsi, Prosedur dan Inspeksi, Hukum, Prosedur dan Inspeksi, yang harus dalam kasus penyelesaian lain, prosedur dan inspeksi harus dikalahkan. Prioritas.

Bagian 50 (1) dan (2) Bagian 50 (1) dan (2) Undang-Undang 2002 v. Komisi Pengecualian dituntut oleh dua lembaga penegak hukum yang terakreditasi, polisi, dalam penyelidikan korupsi di bidang ini. dari korupsi. Polisi dan kejaksaan sebagai penyidik korupsi setempat Menurut Briпка

Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Barat Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu ke pasal 63 KUHP Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar, misalnya dalam kasus hukum media kan ancaman nya cuma 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63 kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritias Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi Rifai yaitu Ahli Pidana dan Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran.

Jika ada laporan tentang mereka yang mencurigai hukum pidana, Pasal 1 menekankan hukum hukum sholat pidana. Pastikan Anda ingin menyelidiki menurut hukum terbatas. Para peneliti pada tahap ini adalah langkah-langkah utama peristiwa pidana Indonesia karena mereka mencoba mengungkapkan fakta dan bukti tindakan kriminal dan untuk menemukan kecurigaan eksekutif pidana.

Adanya penyidikan memungkinkan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang seharusnya diduga melakukan tindak pidana. Pasal 44 (2) Pasal 30 Undang-Undang Komisi Pemberantasan 2002 juga menjelaskan definisi “barang bukti”. Pertanyaan yang ditemukan dalam kedua pengujian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada informasi atau data yang disajikan, dikirimkan, diterima atau disimpan, baik konvensional, elektronik maupun optik, dapat dibagi menjadi dua kategori: Kondisi mencurigakan.

Penyidik korupsi kesulitan mengidentifikasi dugaan korupsi dana bersama. Masalah ini muncul karena penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan adat, sehingga mengganggu jalannya penyidikan. Sebagai penyidik kasus korupsi, polisi menghadapi masalah dalam menuntut tindak pidana korupsi di kotanya: pertama, para saksi enggan

membantu. Saksi sering diperlakukan dengan baik dan formal, dan sulit untuk bersaksi. Kedua, penyidik korupsi terlebih dahulu memberikan bukti nilai kerugian korupsi di dalam negeri dan dukungan dari instansi lain, seperti Pemerintah Lampung Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jangka waktu yang lama lebih dari dua bulan.

Korupsi dapat berdampak positif pada sektor sosial, tetapi juga melahirkan inefisiensi, ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan. Korupsi terjadi dengan sendirinya. Artinya, pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya secara pribadi atau dalam skala kecil untuk menerima suap. Namun, korupsi bisa meluas dan sistematis. Menurut Luis Moreno Ocampo, korupsi yang mengabaikan aturan main disebut *super-corruption*. Di sisi lain, Herbert Wellin menyebutnya korupsi sekunder dan membandingkannya dengan alkoholisme.

Korosi untuk memulai koridor dapat memiliki efek berbahaya. Korupsi ini biasanya dalam konteks pemerintah daerah (kota) di banyak negara. Korupsi sistematis adalah menghentikan insentif dengan kerugian ekonomi. Kehilangan kerugian politik politik dan kerugian sosial karena kekuatan dan kekuasaan. Kehilangan kehilangan politik. Jika korupsi meningkat dengan cara yang dihormati, supremasi hukum dianggap

sebagai minor dan insentif untuk investasi yang akurat. Pembangunan ekonomi dan hasil hasil politik.

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari peraturan, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Aparat penegak hukum telah menetapkan tujuan untuk menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Tanpa penegakan hukum, kekacauan bisa merajalela di sebuah negara, bisa hilang dan hancur. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hukum berlaku untuk semua orang. Secara khusus, penting bagi lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya untuk mematuhi hukum. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah masalah korupsi, khususnya korupsi dengan dana desa.

Jika korupsi dihancurkan, perilaku bencana dan korupsi yang rusak adalah jawaban yang benar. Keberhasilan korupsi memiliki dampak positif dari orang, orang dan bangsa. Alasan korupsi ilegal ilegal secara ilegal 1 Grup petugas, nilai, nilai etika, pembangunan berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) aplikasi stabilitas keamanan keamanan untuk ancaman serius.

Untuk membasmi korupsi, kita perlu memahami dua hal penting. Di satu sisi,

ini berlaku untuk undang-undang indikatif atau korupsi, dan di sisi lain, untuk otoritas yang berwenang memerangi korupsi pada tahap penyelidikan, penuntutan dan pengadilan.

Pengawasan terhadap penyaluran sumber dana desa tidak terlepas dari struktur, kemampuan dan tanggung jawab yang biasa terdapat dalam struktur organisasi pelaksanaan. Struktur organisasi yang menerapkan prinsip distribusi dan tanggung jawab lintas fungsi untuk membentuk dana desa dengan amanat dan tanggung jawab yang jelas.

Namun, implementasi implementasi, fungsinya belum diimplementasikan, terutama untuk mengimplementasikan tugas dalam berbagai implementasi, dan karyawan LPMD dapat mengurangi hak mereka untuk mengurangi efek tanggung jawab untuk mengurangi pengawasan dan pembayaran. Karena tidak ada cukup penyesuaian antara garis, beberapa fungsi dianggap dirilis jika beberapa fungsi dapat dilihat secara terpisah. Pemantauan juga merupakan kapasitas sumber daya properti. Ini adalah salah satu faktor yang ditentukan oleh implementasi kebijakan ini. Sumber daya keuangan adalah sumber daya manusia (dengan kualifikasi, hak, hak, dan kewajiban) tugas kepatuhan, dan pentingnya agen persiapan atau sumber daya yang disediakan oleh keputusan politik yang tidak dapat dipisahkan dari

sumber daya yang sesuai, menyediakan sumber daya teknis dan sumber daya psikologis yang tidak dipisahkan, dari sumber daya yang sesuai, Itu mungkin.

Implementasi dan implementasi bidang ini, kemampuan untuk mensosialisasikan kebijakan tambahan, kemampuan sumber daya manusia, dan kemampuan para peserta) seringkali sering terjadi untuk menambah kabupaten tambahan. Di sisi lain, masih ada kelemahan dalam hal sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat teknologi implementasi yang tidak tidak rata, yaitu, kemampuan untuk dengan cepat mendeteksi dan memecahkan masalah. Namun, kemampuan untuk mengelola perusahaan tidak memengaruhi dampak tambahan.

Model keterlambatan pembayaran upah desa ini dianggap sebagai praktik umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari walikota atau untuk mengembangkan kebijakan tentang penggunaan uang desa. Dehyar Rausta berada pada posisi yang sangat strategis untuk memenangkan pemilu.

Korupsi dari berbagai bentuk dana desa ini diharapkan jika semua tahapan pencairan dana desa diawasi oleh warga desa dan berbagai organisasi dengan manajemen yang efektif. Penyalahgunaan kekuasaan selalu dimungkinkan karena ada peluang yang terbuka.

Pasal 351 Ayat 2 mengatur tentang prosedur hukum yang menimbulkan kerugian serius. Dimana unsur pelecehan dijelaskan dalam Pasal 351(2) sehubungan dengan arti pelecehan di atas:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur Perbuatan
- c. mengecualikan konsekuensi dari komponen yang menyakitkan atau rusak parah. Babyla mengidentifikasi unsur-unsur penegakan hukum dalam pasal 351(2) di atas, dan kemudian mengidentifikasi unsur-unsur dalam pasal 351(2) yang hampir sama dengan yang ada dalam pasal 351(1) KUHP.

Upaya Pencegahan Penyelewengan Dana Pekon Suka Mulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat

Para peneliti bekerja untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam dua bidang hukum: hukum normatif dan hukum sosial progresif. Teknologi standar berarti bahwa penjahat hanya mematuhi beberapa ketentuan hukum. Seperangkat prinsip hukum atau peraturan yang menjadi tujuan atau dasar untuk melakukan proses hukum di tingkat penelitian. Ranah hukum hanyalah salah satu objek hukum yang sebenarnya atau rumusan sederhana, yaitu rumusan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap jurnalis, dalam hal ini polisi, harus lebih fokus dan

proaktif dalam mengusut kasus-kasus kriminal, termasuk penganiayaan serius terhadap korban. Kecuali jika angka penyalahgunaan terus meningkat. Dalam menangani banyak kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis, polisi harus melibatkan masyarakat dan polisi harus memberi tahu pihak berwenang. Karena masyarakat ingin melindungi hak-haknya, maka aparat penegak hukum harus selalu peduli dengan hak asasi manusia. Padahal, bukan hanya untuk kepentingan publik, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang hukum.

Dalam penyidikan, faktor-faktor tersebut harus dimasukkan dalam perbuatan tersangka menurut Pasal 351 (1). Alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan terdakwa, telah menentukan persyaratan pembuktian minimal dan terdapat bukti bahwa terdakwa melanggar teks pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal 351(2) KUHP.

Menurut Bripka Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu ke pasal 63 KUHP Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar,

misalnya dalam kasus hukum media kan ancaman nya cuman 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63 kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritias Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi Rifai yaitu Ahli Pidana dan Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran.

Pengembalian dan / atau nilai untuk semua tanda terima untuk orang-orang mahal. Anggaran dan tahun fiskal di masa depan diterima. Perusahaan biaya harus diadakan untuk akuntansi. Dokumen

manajemen pengeluaran harus diserahkan ke tanda tangan permintaan pembayaran (SPP) yang akan diterapkan pada peraturan desa yang terkait dengan APK atau APK Ganti.

Menurut Pasal 18 Destinasi Pusat dan Daerah, dana Kota Kota (10%) dana kota (10%) dalam Anggaran Kota (10%). Implementasi kegiatan keuangan APBDEA sepenuhnya diimplementasikan oleh tim pelaksanaan desa dan mengacu pada peraturan peraturan / pasar. Menggunakan dana manusia, pengeluaran adalah 30%, dan biaya lembaga pemerintah badan-badan pemerintah lembaga pendaftaran lembaga pemerintah adalah 70%.

Pekerjaan hak adalah bagian penting dari perkembangan hukum, dan pengembangan hukum itu sendiri adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Penerapan upaya untuk mengurangi definisi sosial. Anda dapat melakukan kekacauan, bea cukai dan kerusakan tanpa menerapkan hak nasional. Oleh karena itu, penting untuk berurusan dengan seseorang melalui pemasangan metode UI dengan implementasi metode UI dengan implementasi metode UI (seperti pelaksana metode UI (seperti polisi, pengadilan, kurikulum, dan lainnya Institusi Nasional). Pekerjaan pengacara untuk perlindungan adalah korupsi, terutama masalah uang orang.

Berpartisipasi dalam rencana anggaran yang berpartisipasi, Anda dapat melihat peran BPD dan kemudian secara bertahap melihat apakah kota ini bertanggung jawab. Masyarakat diikuti oleh APOL dan meningkatkan ketentuan untuk kursus dealer dalam prosedur transaksi pembangunan perkotaan, dan juga dapat dilihat dalam peran tokoh masyarakat dari perspektif mempersiapkan APOL. Partisipasi dalam komunitas komunitas sangat penting untuk menciptakan rencana pembangunan, dan APBD di masa depan adalah tujuan yang tepat. Masalah untuk niat baik pada niat baik pemerintah melalui gairah, termasuk para pemimpin masyarakat, termasuk tokoh masyarakat.

Kemudian, kemampuan sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Mendistribusikan dana ke kota-kota peserta (APBD, dll). Dalam rangka pengelolaan kota, rencana pembangunan kota disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan wilayah kabupaten/kota. Rencana pembangunan kota disusun dengan partisipasi masyarakat di bawah kepemimpinan pemerintah kota.

Saat menyiapkan rencana pengembangan seseorang, Anda harus berurusan dengan agen komunitas komunitas. Tambahan ini adalah salah satu

anggota pendapatan anggaran dan kepribadian pendapatan (APTRES). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatan dibuat oleh Forum Dorfrech Pengembangan Perencanaan Konferensi (murenbangdes).

Musrenbangdes merupakan forum untuk membahas usulan rencana aksi pembangunan perkotaan berdasarkan Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perkotaan (P3MD). Prinsip ini menuntut kota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan pembangunan, khususnya pembangunan kota masing-masing. Biarkan masyarakat benar-benar memenuhi kebutuhan/kebutuhan pembangunannya. Seluruh usulan kota yang digunakan untuk kegiatan penguatan bisnis dan masyarakat dapat dilihat secara detail dalam pembahasan Musrenbang.

Hasil dari rencana tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mempromosikan tata kelola dan pembangunan perkotaan selama satu tahun, bersama dengan kegiatan yang menggunakan sumber daya selain ADD. Oleh karena itu, rencana yang disepakati juga harus transparan. Hal ini diketahui dan dapat dijelaskan pada tingkat sosial.

Pasal 351 Ayat 2 mengatur tentang prosedur hukum yang menimbulkan kerugian serius. Dimana unsur pelecehan

dijelaskan dalam Pasal 351(2) sehubungan dengan arti pelecehan di atas:

- d. Unsur kesengajaan
- e. Unsur Perbuatan
- f. mengecualikan konsekuensi dari komponen yang menyakitkan atau rusak parah. Babyla mengidentifikasi unsur-unsur penegakan hukum dalam pasal 351(2) di atas, dan kemudian mengidentifikasi unsur-unsur dalam pasal 351(2) yang hampir sama dengan yang ada dalam pasal 351(1) KUHP.

Para peneliti bekerja untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam dua bidang hukum: hukum normatif dan hukum sosial progresif. Teknologi standar berarti bahwa penjahat hanya mematuhi beberapa ketentuan hukum. Seperangkat prinsip hukum atau peraturan yang menjadi tujuan atau dasar untuk melakukan proses hukum di tingkat penelitian. Ranah hukum hanyalah salah satu objek hukum yang sebenarnya atau rumusan sederhana, yaitu rumusan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan terhadap jurnalis, dalam hal ini polisi, harus lebih fokus dan proaktif dalam mengusut kasus-kasus kriminal, termasuk penganiayaan serius terhadap korban. Kecuali jika angka penyalahgunaan terus meningkat. Dalam menangani banyak kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis, polisi harus melibatkan masyarakat dan polisi harus

memberi tahu pihak berwenang. Karena masyarakat ingin melindungi hak-haknya, maka aparat penegak hukum harus selalu peduli dengan hak asasi manusia. Padahal, bukan hanya untuk kepentingan publik, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang hukum.

Dalam penyidikan, faktor-faktor tersebut harus dimasukkan dalam perbuatan tersangka menurut Pasal 351 (1). Alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan terdakwa, telah menentukan persyaratan pembuktian minimal dan terdapat bukti bahwa terdakwa melanggar teks pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal 351(2) KUHP.

Menurut Bripka Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi gini kita mengacu ke pasal 63 KUHP. Jika akta dihentikan karena beberapa alasan pidana, satu aplikasi akan dibuat jika perubahan tertentu telah dibuat yang meningkatkan risiko ke tingkat yang lebih besar, misalnya dalam kasus hukum media ancaman nya cuma 2 tahun sedangkan 351nya dia 2 Tahun 8 bulan jadi yang kita kenakan itu Pasal 351 yang paling berat. jadi dia gak bisa di gabungin gak bisa berlapis. Kalo Undang Undang yang kita terapkan yaitu Pasal 351 karna di Pasal 63

kita gabungkan mana yang paling berat yaitu 351.

Menurut Briпка Adi Agus Candra selaku Anggota Sat Reskrim Polres Lampung Utara Pada Rabu, 9 Juni 2021 Jam 09.30 Wib, Jadi pertama kita proses penyidikan itu 351 kemudian kita minta visum kerumah sakit, kemudian berkas kita kirim ke JPU namun disana ada petunjuk dari JPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dan Ahli Kedokteran. Dalam saksi kasus Ardi Yohaba yaitu ada sekitar 12 orang yaitu termasuk Ardi Yohaba, Aji Renodin, Defrijan dari rekan rekan wartawan kemudian dari panitia sepak bola tersebut yaitu Dr. Handes Sailan Ambritias Boy, Suroto, Puryono, Poni Irfan alias Candra, Niko Dimususilo, Sailimitras selaku anggota TNI yang stay di Stadion Dr Edi Rifai yaitu Ahli Pidana dan Indri Minting yaitu Ahli Kedokteran.

Dengan mengelola penelitian tentang korupsi lokal, ada polisi dan penuntutan melalui komite untuk menghilangkan dua metode otentikasi, yaitu, 50 ayat 5 dan 2, untuk menghilangkan korupsi korup. Untuk menghilangkan kejahatan pembusukan sehubungan dengan penghapusan kejahatan korupsi, para peneliti didedikasikan untuk menghilangkan kejahatan korupsi sehubungan dengan penghapusan korupsi

sehubungan dengan penghapusan kejahatan korupsi. Karena itu.

Pasal 1 menekankan hukum pidana. Ada laporan hukum pidana, dan Pasal 1 menekankan hukum: "Survei ini adalah seri untuk menemukan peristiwa mencurigakan untuk menemukan bahwa itu adalah kejahatan, ini adalah serangkaian tindakan / investigasi. Tentukan. Penelitian ini adalah langkah paling penting dalam peristiwa pidana Indonesia. Pada tahap ini, para peneliti mencoba mengidentifikasi tindakan dan pedoman pidana dan mencoba menemukan penjahat kriminal.

Bahwa investigasi seseorang dapat disebut sebagai tersangka atas dasar bukti asli yang harus diduga itu adalah aktor kriminal. Definisi "bukti" dijelaskan dalam Pasal 44 (2) no. 2 bersih No. 30 tahun 2002 tentang kerusakan pemberantasan korupsi, yaitu tujuan awal yang cukup dianggap ada, karena ini ditemukan setidaknya 2 (dua) bukti, Termasuk dan tidak terbatas dalam informasi atau data yang diterima, diterima, menerima, menerima, menerima, menerima, menerima, disimpan, baik secara normal maupun optik atau optik. Pada prinsipnya, fungsi bukti pertama adalah unit dengan fungsi bukti yang cukup, bukti yang cukup. Klasifikasi 2 (dua) kategori, yaitu persyaratan: (1). Penelitian; (2). Tetapkan status tersangka.

Menurut Keterangan AKP Made Silpa Yudiawan, SH, SIK Selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Pada tanggal 14 Maret 2020 Pukul 11.30 Wib Penyidik korupsi kesulitan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di reksa dana. Masalah ini muncul karena penyidikan perkara korupsi dilakukan secara tidak normal dan tidak sesuai dengan adat, sehingga mengganggu jalannya penyidikan. Tantangan yang dihadapi oleh polisi yang menyelidiki korupsi dalam penuntutan tindak pidana korupsi di kota dan desa: Pertama, saksi sering merasa sulit untuk bersaksi selain kerjasama yang tidak diinginkan. Buktinya, mereka sedang ditantang secara resmi dan sepatutnya. Kedua, penyidik tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu memperoleh bukti besarnya kerugian negara dan meminta bantuan kepada lembaga korupsi dan lembaga lain seperti Pemerintah Lampung Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jangka waktu yang lama lebih dari dua bulan.

Korupsi tidak aktif mempengaruhi sektor sosial, tidak ada efek korup dan penipuan dan peningkatan dampak. Korupsi terjadi secara mandiri. Dengan kata lain, pejabat itu berarti bahwa itu adalah kelompok kecil yang menggunakan wewenang untuk meminta wewenang untuk meminta penyuaipan. Namun,

korupsi dapat disusun secara sistematis dalam epidemi. Menurut Luis Moreno Ocampo, korupsi mengabaikan aturan permainan, dan korupsi yang super disebut disebut. Herbert Werlin membandingkannya dengan alkoholisme hanya dengan memanggilnya dengan korupsi tambahan.

Korosi untuk memulai koridor dapat memiliki efek berbahaya. Korupsi ini biasanya dalam konteks pemerintah daerah (kota) di banyak negara. Korupsi sistematis adalah menghentikan insentif dengan kerugian ekonomi. Kehilangan kerugian politik politik dan kerugian sosial karena kekuatan dan kekuasaan. Kehilangan kehilangan politik. Jika korupsi meningkat dengan cara yang dihormati, supremasi hukum dianggap sebagai minor dan insentif untuk investasi yang akurat. Pembangunan ekonomi dan hasil hasil politik.

Penegakan merupakan bagian integral dari peraturan, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Aparat penegak hukum telah menetapkan tujuan untuk menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Tanpa penegakan hukum, kekacauan bisa merajalela di sebuah negara, bisa hilang dan hancur. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hukum berlaku untuk semua orang. Secara khusus,

penting bagi lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya untuk mematuhi hukum. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah masalah korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Penilaian korupsi adalah korupsi korupsi dan korupsi korup. Keberhasilan korupsi adalah dengan menggunakan manfaat hukum orang, nasional, nilai-nilai, nilai-nilai etika, demokrasi, nilai-nilai etika dan definisi dan pembangunan berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) dan dampaknya yang berbahaya.

Korupsi adalah dua hal penting untuk memahami sistem giliran kedua untuk memahami sistem giliran kedua untuk teknologi korupsi kedua dan untuk menyelesaikan tindakan kriminal dalam kehadiran atau hukum dan peraturan positif yang menghambat korupsi. Melangkah. Keputusan dan penilaian.

Implementasi implementasi alokasi alderech tidak dapat dipisahkan dari struktur dan tanggung jawab pekerjaan dan izin yang disusun oleh struktur implementasi organisasi. Struktur organisasi dana publik dibentuk dengan memberikan arahan otoritas dan dedikasi dan arah dedikasi dengan fungsi yang jelas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab setiap orang, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan cabang eksekutif dan LPMD lainnya. , efeknya hilang. dari sutradara. Selain itu, karena kurangnya koordinasi antar lini, berbagai fungsi beroperasi secara individual, yang berkontribusi pada munculnya ketidakpercayaan. Pemantauan juga erat kaitannya dengan jumlah sumber daya yang tersedia. Sumber daya penegakan kebijakan merupakan salah satu faktor penentu. Dalam mempersiapkan agen pelaksana atau sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, pelaksana harus memiliki sumber daya manusia (jumlah orang dan kekuasaan yang cukup). dan tanggung jawab), sumber daya ekonomi, teknis dan psikologis.

Menurut Penulis upaya dan langkah-langkah penanganan kasus tindak pidana korupsi di Pekon Suka Mulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, Mulailah dengan melakukan survei, mengelola survei, dan menyelaraskan secara optimal dengan organisasi yang sudah terlibat. Namun, interogasi tersangka dihalangi oleh saksi kepala yang mengajukan pengaduan 2018 ke Pekon AD dan akuntan publik Pekon atas nama Miata, yang meninggal sebelum pengumuman. Proses pemungutan suara.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses Penyimpangan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Pekon Sukamulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, Selain administrasi bidang ini, penegakan adalah pertanyaan umum terkait dengan cabang regional tambahan. Sosialisasi politik, fitur sumber daya manusia, partisipasi masyarakat. Di sisi lain, tingkat teknologi tidak merata implementasi, yaitu pendidikan masih rendah, dan masih lemah dalam hal sumber daya manusia yang mempengaruhi kemampuan untuk dengan cepat mendeteksi dan memecahkan masalah. Namun, kemampuan untuk mengendalikan komunitas tidak mempengaruhi implementasi tambahan.
2. Upaya Pencegahan Penyelewengan Dana Pekon Suka Mulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, upaya dan langkah- langkah Satuan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Lampung Barat dalam penanganan kasus tindak pidana

korupsi di Pekon Suka Mulya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, sudah optimal yang dimulai dengan pemenuhan administrasi penyelidikan dan penyidikan serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun hasil pemeriksaan terhadap tersangka terhambat dengan saksi kunci yang membuat proposal pengajuan AD Pekon Tahun 2018 sekaligus sebagai Bendahara Pemerintahan Pekon atas nama Miat yang meninggal dunia sebelum proses penyidikan dilakukan.

5.2 Saran-Saran

1. Kepala kota gagal mengarahkan prioritas yang sama untuk periode yang sama untuk periode yang sama untuk periode yang sama untuk periode yang sama.
2. Prioritaskan program lain dan tulis sebagai kegiatan yang memengaruhi program lain secara langsung pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bakhri, Syaiful. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Hamzah, Andi, (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hartono, (2010) *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, (2008). *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Larasati, Galuh. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Rusli (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta ; UII Pres\
- Muslan, Abdurrahman (2009) *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Nurdjana, Igm (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki (2008) *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. Ke 2, Jakarta